

**INTEGRASI KOMERSIAL DAN SOSIAL KEUANGAN ISLAM:
PENGALAMAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI RIAU**

ADE CHANDRA¹⁾

**¹⁾Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia
HP. 081365248311 e-mail : adec152@gmail.com**

ABSTRACT

In the Islamic economic system, Islamic economic and finance is not only focus in commercial aspects, but also care about social aspects. Both aspects must not be dichotomized. This research discusses Islamic commercial and social finance integration in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Riau Province. This research is development from previous research that used qualitative method to determine model for integrating Islamic commercial and social finance in BMT, also included survey, in-depth discussion, Delphi method and Analytic Network Process (ANP). The result of the research shows that Islamic commercial and social finance integration of BMT in Riau Province divided into three categories: (1) Islamic commercial finance (Baitut Tamwil) without Islamic social finance (Baitul Maal), (2) Islamic commercial finance (Baitut Tamwil) but Islamic Social finance (Baitul Maal) only from BMT profit, (3) Integration Islamic commercial finance (Baitut Tamwil) and Islamic Social finance (Baitul Maal) implementing together among BMT members, society and other stakeholder.

Keywords: *Integration, BMT, Islamic Finance, Commercial, Social*

ABSTRAK

Dalam sistem ekonomi Islam, ekonomi Islam dan keuangan tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga peduli tentang aspek sosial. Kedua aspek harus tidak dipisah. Riset ini mendiskusikan integrasi komersial dan sosial keuangan Islam dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Provinsi Riau. Riset ini pengembangan dari riset sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif untuk menentukan model dalam mengintegrasikan komersial dan sosial keuangan Islam di BMT, termasuk juga survey, diskusi mendalam, metode Delphi dan Analytic Network Process (ANP). Hasil riset menunjukkan bahwa integrasi komersial dan sosial keuangan Islam dari BMT di Provinsi Riau dibagi dalam tiga kategori: (1) Komersial Keuangan Islam (Baitut Tamwil) tanpa Keuangan Sosial Islam, (2) Keuangan Komersial Islam (Baitut Tamwil) tetapi Keuangan Sosial Islam (Baitul Maal) hanya dari keuntungan BMT, (3) Integrasi Keuangan Komersial Islam (Baitut Tamwil) dan Keuangan Sosial Islam (Baitul Maal) diimplementasikan bersama antara anggota BMT, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata Kunci: *Integrasi, BMT, Keuangan Islam, Komersial, Sosial*

A. PENDAHULUAN

Institusi keuangan dalam sejarah Islam pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan kemudian oleh para sahabat beliau. Institusi itu kemudian disebut Baitul Maal. Saat ini praktik Baitul Maal di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan memiliki peran sangat berbeda yang bermain pada masyarakat (Hamzah, Rusby, & Hamzah, 2013) *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) adalah badan usaha mandiri terpadu yang berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya (Ridwan, 2013). Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan, bersifat informal karena didirikan oleh swadaya masyarakat (Djazuli et al., 2002).

1. Latar Belakang Penelitian

BMT adalah suatu institusi pembiayaan kecil yang beroperasi menggunakan konsep campuran dari “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” dengan fokus target pada sektor bisnis kecil (Andriani, 2005).

Konsep dari Baitul Maal dalam suatu institusi BMT adalah berperan sebagai suatu institusi keagamaan dan sosial dengan mengumpulkan dana dari Zakat, Sedekah dan infak dan mendistribusikan dana tersebut bagi yang memerlukan (seperti Asnaf dari zakat dan penerima lainnya). Dengan konsep ini, BMT juga berlaku sebagai institusi zakat (Amil). Konsep dari Baitul Tamwil dalam suatu institusi BMT berperan sebagai institusi bisnis yang mengelola aktifitas bisnis terkait dalam perdagangan (jual dan beli beragam komoditas) dan sebagai suatu institusi keuangan yang memberikan fasilitas-fasilitas tabungan dan produk-produk keuangan (Hamzah et al., 2013).

Praktiknya, suatu BMT lebih mengembangkan Baitul Tamwil atau bisnis dan cenderung tidak menjalankan Baitul Maal. Padahal Baitul Tamwil dan Baitul Maal merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan untuk menjaga keseimbangan sekaligus menjalankan peran yang terangkum dari penamaan BMT yaitu Baitul Maal Wat Tamwil atau Baitul Maal dan Baitut Tamwil.

2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

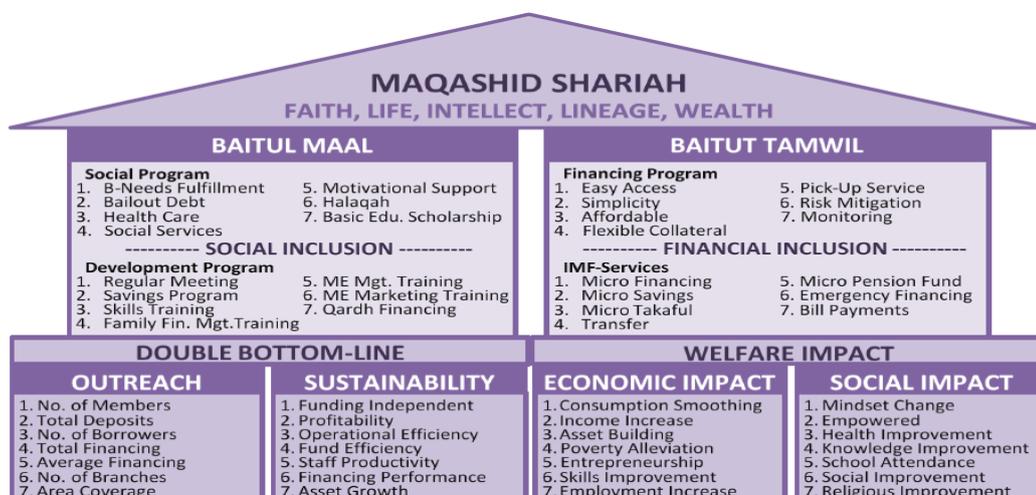
- a. Untuk mengetahui bagaimana suatu BMT menjalankan perannya sebagai Baitul Maal dan Baitut Tamwil.
- b. Untuk mengetahui pengaruh suatu BMT menjalankan perannya sebagai Baitul Maal dan Baitut Tamwil.
- c. Untuk mengetahui model terbaik suatu BMT menjalankan perannya sebagai Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Apakah hanya menjalankan Baitul Maal saja model yang terbaik? atau hanya menjalankan Baitul Tamwil saja model yang terbaik? atau menjalankan kedua peran BMT model terbaik?

- d. Untuk mengetahui apabila suatu BMT menjalankan kedua perannya, maka model praktik terbaik suatu BMT apakah menjalankan peran Baitul Maal hanya dari keuntungan menjalankan peran Baitut Tamwil atau menjalankan peran Baitul Maal dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait integrasi komersial dan sosial keuangan Islam yang telah dilakukan sebelumnya merekomendasikan enam model Keuangan Mikro Syariah (KMS) (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017), yang didalamnya terdapat BMT, yaitu:

- a. Model KMS-1: BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menunjuk PIC (Person In Charge) atau membentuk Unit Sosial sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari organisasi pengelola zakat (OPZ) dan mengelola wakaf uang sebagai Nazhir.
 - b. Model KMS-2: BMT sebagai LKMS membuat Unit Baitul Maal sebagai UPZ dari organisasi pengelola zakat (OPZ) dan mengelola wakaf uang sebagai Nazhir.
 - c. Model KMS-3: BMT sebagai LKMS memiliki divisi Baitul Maal (BM) sebagai Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dan Nazhir, serta divisi Baitul Tamwil (BT) sebagai LKS/LKS-PWU (Pengelola Wakaf Uang) yang mengelola dana ZIS-Waf BM.
 - d. Model KMS-4: Koperasi Syariah/BMT sebagai LKMS mendirikan BM sebagai MPZ dan Nazhir, serta LKMS sebagai LKS/LKS-PWU yang mengelola dana ZIS-Waf BM.
 - e. Model KMS-5: Koperasi Syariah/BMT sebagai LKMS membentuk Unit Sosial sebagai MPZ dan Nazhir, serta LKMS sebagai LKS/LKS-PWU yang mengelola dana ZIS-Waf BM.
 - f. Model KMS-6: BMT/LKMS bekerjasama dengan MPZ/OPZ dan MPW/OPW yang didirikan oleh induk organisasi, masing-masing terpisah untuk fokus mengelola ZIS dan wakaf secara profesional.
- a. Berikut gambar hasil penelitian terdahulu:



Gambar 1. Integrasi Komersial dan Sosial Baitul Maal Wat Tamwil (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017)

4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dikembangkan untuk memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktik model terbaik BMT sehingga memberikan banyak manfaat kepada para stakeholdernya.
- b. Memudahkan para praktisi BMT dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam memilih model terbaik bagi pengembangan lembaganya.
- c. Memperkaya khasanah penelitian dalam inovasi dan pengembangan BMT secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- d. Menjadi referensi bagi para akademisi dan penelitian selanjutnya sehingga peran BMT semakin luas dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi dan transaksi keuangan syariah.
- e. Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan BMT dan LKMS secara nasional serta merekomendasikan untuk implementasinya ditingkat global.

B. KONSEP TEORITIS

1. Konsep BMT

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi atau peran (Andriani, 2005), yaitu:

- a. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) yaitu kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi bagi pengusaha mikro dan kecil terutama menabung dan pembiayaan. Hasilnya ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan (Adnan & Ajija, 2015).
- b. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ridwan, 2013):

- a. Berorientasi bisnis yaitu memiliki tujuan mencari laba dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi bagi anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, hibah dan wakaf (Abdullah & Ismail, 2017).
- c. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar BMT.

Kesuksesan BMT ditentukan oleh faktor-faktor utama (Hosen & Sa'roni, 2012) berikut:

- a. Kemampuan manajemen keuangan
- b. Karakteristik anggota pembiayaan
- c. Kemampuan manajemen risiko
- d. Keakraban antara anggota dan tim manajemen BMT
- e. Teknologi informasi dan jaringan kerja.

2. Sejarah Singkat BMT di Indonesia

BMT sudah ada di Indonesia sejak tahun 1992 atas inisiasi dari Aries Mufti dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamildi Jakarta Pusat. Namun, secara formal BMT didirikan tahun 1995 segera setelah ditetapkannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Islam Pertama di Indonesia yang telah diinisiasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Hamzah et al., 2013).

Dari data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) pada 12 Februari 1998, ada 2000 unit BMT berdiri di Indonesia. Tetapi hanya 384 unit BMT yang terdaftar di PINBUK dengan lebih dari 79,325 orang investor, dan total penerima pembiayaan 28,430 orang dengan pembiayaan sebesar Rp. 11 milyar atau 31 juta Ringgit Malaysia (RM) (Karim, 2009).

Selanjutnya dari data Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) menyampaikan pada Desember 2006 terdapat 3,500 unit BMT beroperasi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp. 2 triliun. Tahun 2010 ada 4.000 unit BMT di Indonesia dengan aset mencapai Rp3 triliun atau setara dengan RM315 miliar (Hamzah et al., 2013).

Tahun 2015, Indonesia memiliki 4.500 BMT dengan 3,7 juta anggota, aset Rp16 triliun dan tenaga kerja 20 ribu orang (Puspayoga, 2013).

3. Provinsi Riau dan BMT

Indonesia terdiri atas 34 provinsi, di mana salah satunya adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan satu dari sepuluh provinsi yang terletak di pulau Sumatera.

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Pembangunan Provinsi Riau ditetapkan melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958 dengan Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang. Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00” Lintang Selatan sampai 02°25'00” Lintang Utara dan 100°00'00” sampai 105°05'00” Bujur Timur (Umum, 2013) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 6.657.911 jiwa dengan persentase penduduk miskin posisi September 2017 sebesar 7,41 persen (Indikator Strategis, 2017).

Umumnya BMT berbadan hukum koperasi. Posisi 2017, Provinsi Riau ada 2.551 koperasi aktif yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Koperasi (nik.depkop.go.id, 2017). Rinciannya:

Tabel 1: Koperasi Aktif yang memiliki NIK di Riau

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi ber NIK
1	Kapupaten Kuantan Singingi	143
2	Kapupaten Indragiri Hulu	181
3	Kapupaten Indragiri Hilir	177
4	Kapupaten Pelalawan	171
5	Kapupaten Siak	152
6	Kapupaten Kampar	286
7	Kapupaten Rokan Hulu	184
8	Kapupaten Bengkalis	290
9	Kapupaten Rokan Hilir	291
10	Kapupaten Kepulauan Meranti	95
11	Kota Pekanbaru	419
12	Kota Dumai	162
Total		2.551

Tetapi ada 19 BMT aktif di Provinsi Riau posisi 2017, sebagaimana digambarkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: BMT Aktif di Riau

No	Nama BMT	Lokasi
1	BMT Islam Abdurrab	Pekanbaru
2	BMT Al-Ittihad	Pekanbaru
3	BMT Mitra Arta	Pekanbaru
4	BMT Bumi Melayu	Pekanbaru
5	BMT Tuanku Tambusai	Pekanbaru
6	BMT Septa Bina Usaha	Pekanbaru
7	BMT Al Amin	Pekanbaru
8	BMT Permata	Pekanbaru
9	BMT Fasih	Pekanbaru
10	BMT Bina Insan Mulia	Pekanbaru
11	BMT Amanah	Pekanbaru
12	BMT Al Kiffah	Pekanbaru
13	BMT Al-Barokah	Kampar
14	BMT Marwah	Kampar
15	BMT Jamius Shogir	Kampar
16	BMT Al-Hijrah	Kampar
17	BMT Islamic Siak	Siak
18	BMT Bina Swadaya	Duri
19	BMT DJami'	Rengat

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Delphi

Metode Delphi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para pakar dan praktisi untuk mengetahui keadaan awal tentang kriteria komersial maupun sosial BMT dalam membuat suatu kebijakan dalam hal integrasi model BMT, sehingga diperoleh data yang bersifat kualitatif untuk kemudian dilakukan proses pembobotan (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017).

2. Analytic Network Process (ANP)

Analytic Network Process (ANP) adalah suatu teori matematika yang membolehkan satu hal secara sistematis berhubungan dengan tidak terikat dan umpan balik serta dapat menangkap dan mengkombinasikan faktor terlihat dan tidak terlihat dengan menggunakan skala rasio. ANP sebagai suatu teori umum dari pengukuran relatif juga digunakan untuk menurunkan komposisi rasio prioritas dari skala rasio individu yang merefleksikan pengukuran relatif dari elemen-elemen terkait dengan kriteria pengawasan. ANP merupakan pendekatan dalam proses membuat keputusan yang memberikan kerangka umum dalam ujicoba keputusan tanpa membuat asumsi apapun tentang tingkat elemen bebas tingkat lebih tinggi dari tingkat lebih rendah dan tentang elemen-elemen bebas dari tingkat yang sama (Rusydiana & Devi, 2013)

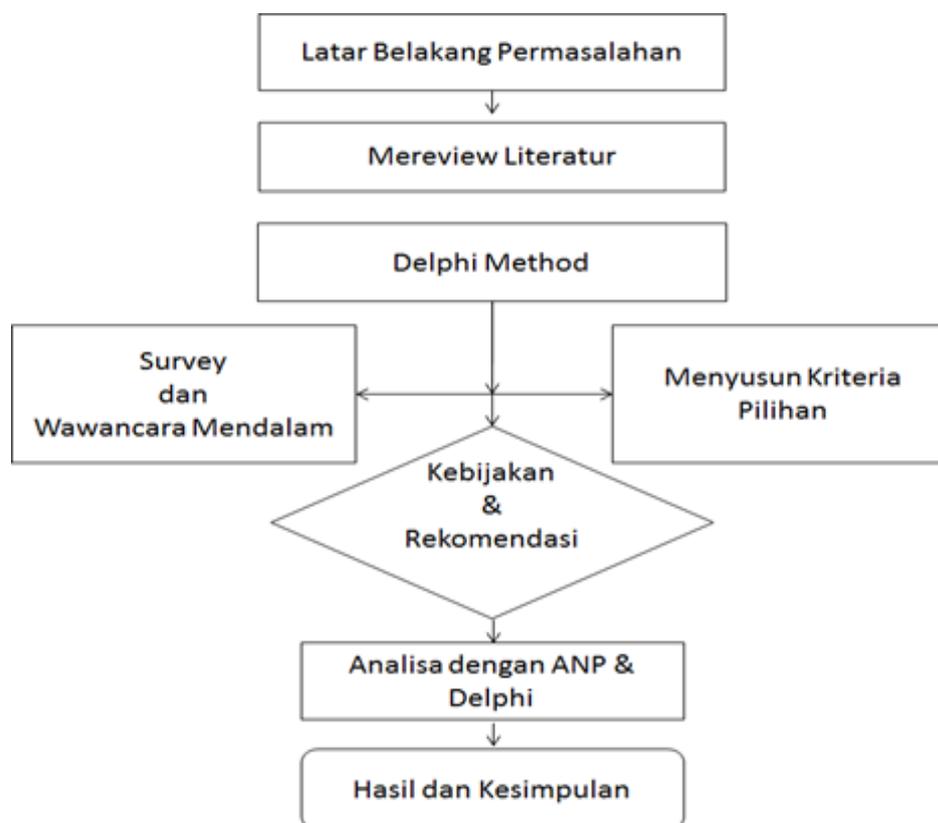
3. Integrasi Delphi-ANP

Analisa pada proses *decision making* yang dilakukan oleh BMT dalam praktik integrasi keuangan komersial dan sosial Islam memerlukan metodologi yang mampu memberikan hasil terbaik dalam *decision making*. Sementara itu, praktik pengintegrasian ini memiliki kriteria keuangan komersial dan kriteria keuangan sosial yang sangat berbeda dan bervariasi, relatif tidak standar dan memiliki model yang sangat bervariasi sehingga data integrasi keuangan komersial dan sosial Islam sulit didapatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini memilih menggunakan pendekatan model integrasi Delphi-ANP (*Analytical Network Process*) (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017).

4. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan model dalam mengintegrasikan komersial dan sosial keuangan Islam di BMT, termasuk juga survey dan wawancara mendalam, menyusun kriteria pilihan, kebijakan dan rekomendasi, metode Delphi dan *Analytic Network Process* (ANP).

Adapun Flowchart penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Flowchart Penelitian

5. Populasi dan Sampel

Dari sembilan belas BMT yang aktif yang ada di Provinsi Riau, hanya enam praktisi BMT yang dijadikan sampel. Kemudian dipilih enam orang akademisi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini dipilih dari responden yang mengerti tentang BMT. Tidak ada maksimum atau minimum jumlah pendapat dari responden terpilih. Karena hal-hal yang lebih utama dipertimbangkan adalah responden harus memiliki kemampuan baik dan pemahaman baik tentang BMT (Rusydziana & Devi, 2013)

6. Kerangka Metode

Untuk mengevaluasi model alternatif pada integrasi komersial dan sosial keuangan Islam yang diaplikasikan pada BMT, peneliti menggunakan metode Delphi dan ANP berdasarkan beberapa kriteria yaitu Kriteria Strategi, Kriteria Keuangan Komersial Islam dan Kriteria Sosial Keuangan Islam. Setiap sub kriteria memiliki elemen yang diidentifikasi dengan metode Delphi (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017).

ANP metodologi dilaksanakan dengan tiga tahap, pertama dengan survey dan wawancara mendalam pada akademisi dan praktisi yang memahami tentang BMT. Kedua, mengembangkan dan menyusun kriteria pilihan dengan pendekatan ANP. Ketiga, menyusun draft kebijakan dan rekomendasi dengan ANP. Analisa dengan ANP memberikan prioritas hasil sehingga menjadi formula optimal untuk rekomendasi kebijakan (Rusydziana & Devi, 2013)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mendapatkan hasil integrasi komersial dan sosial keuangan Islam yang diimplementasikan pada BMT di Provinsi Riau:

1. Mengimplementasikan keuangan komersial Islam (Baitut Tamwil) tanpa keuangan sosial Islam (Baitul Maal).
2. Mengimplementasikan keuangan komersial Islam (Baitut Tamwil) tetapi keuangan sosial Islam (Baitul Maal) hanya dari sisa hasil usaha BMT.
3. Mengimplementasikan integrasi keuangan komersial Islam (Baitut Tamwil) dan keuangan sosial Islam (Baitul Maal) bersama anggota dan masyarakat.

BMT di Riau belum menjalankan optimal dua fungsi dari nama BMT itu sendiri yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Dua fungsi BMT tersebut mestinya melekat dalam keseharian operasional BMT. BMT hendaknya menjalankan dua fungsinya yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Karena bila salah satu saja fungsinya dijalankan sedangkan fungsi yang lainnya tidak dijalankan maka tentunya memberikan pengaruh pada BMT tersebut.

Dari hasil penelitian didapat bahwa model terbaik bagi BMT, khususnya di Provinsi Riau adalah dengan menjalankan kedua fungsinya yaitu sebagai Baitul Maal untuk menjalankan fungsi sosial dan Baitut Tamwil untuk menjalankan fungsi komersial. Tentunya BMT menjalankan fungsinya dengan melibatkan seluruh stakeholder agar efek dan manfaatnya dapat dirasakan juga oleh stakeholder.

Integrasi keuangan komersial Islam (Baitut Tamwil) dan keuangan sosial Islam (Baitul Maal) menyeimbangkan pertumbuhan BMT secara komersial dan secara sosial. Efek positifnya menumbuhkan aset sekaligus kepercayaan dari anggota dan masyarakat serta stakeholder lainnya untuk mendukung usaha-usaha BMT untuk terus tumbuh dan berkembang dari sisi komersial sekaligus sosial.

BMT akan menjadi lokomotif kemajuan usaha, ekonomi dan kesejahteraan anggota, masyarakat dan para stakeholder lainnya. Bahkan BMT dapat meluaskan fungsinya bukannya hanya dalam satu Provinsi. Bisa juga antar Provinsi, antar Negara, bahkan antar benua. Keberhasilan ini dapat dikembangkan ke seantero dunia.

Apalagi konsep BMT dari Indonesia diterima *Islamic Development Bank* (IDB) untuk diterapkan pada Negara-negara muslim lainnya. Tentu ini disyukuri sekaligus cambuk untuk totalitas mengimplemntasikan konsep BMT secara menyeluruh diimbangi inovasi dan kreatifitas.

Kedepan bisa jadi BMT kelak menjadi Baitul Maal sebagai mana dizaman Rasulullah Muhammad SAW. Menjalankan fungsi Negara. Menjadi alternatif utama ketika Negara tidak sanggup lagi menjalankan perannya secara adil dan beradab. Apalagi bila BMT diberikan sentuhan teknologi terkini maka tentu akan sangat memudahkan transaksi kapan dan dimanapun. Tidak lagi terbatas waktu, ruang dan orang. Namun demikian, BMT mesti memiliki mitigasi risiko yang mumpuni karena semakin besar tanggung jawab maka semakin besar juga risikonya. Disinilah perlu sumber daya manusia terbaik dan tim yang solid sehingga apapun tantangan dan perubahan yang terjadi BMT dapat menghadapi dengan baik dan terus maksimal kemanfaatannya.

Penelitian ini juga memudahkan para praktisi BMT dan LKMS bahwa model terbaik adalah menjalankan dua fungsi sekaligus. Fungsi komersial dan fungsi sosial. Selain itu, hasil penelitian ini memperkaya khasanah kebaikan BMT, referensi bagi akademisi dan peneliti serta membantu pemerintah untuk lebih mendorong pengembangan di seluruh Indonesia dan dunia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

BMT di Provinsi Riau dikategorikan dalam tiga model yaitu: (1) menjalankan fungsi komersil tanpa fungsi sosial, (2) menjalankan fungsi komersil tapi fungsi sosial sebatas dari profit BMT, (3) menjalankan fungsi komersil dan fungsi sosial bersamaan, baik dari, oleh dan untuk anggota maupun masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa BMT di Provinsi Riau belum semuanya menjalankan dua fungsinya sekaligus dalam operasional sehari-hari. Padahal konsep BMT merupakan konsep ideal apabila BMT menjalankan dua fungsi tersebut. Integrasi antara komersial dan sosial keuangan Islam pada BMT, khususnya di Provinsi Riau secara jangka panjang dapat memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara seperti:

1. Mengatasi permasalahan kemiskinan anggota dan masyarakat
2. Mengembangkan sosial ekonomi rakyat
3. Menumbuhkan peran lembaga keuangan Islam secara terintegrasi
4. Menjaga pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan Negara Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang.
5. Optimalisasi peran keseimbangan antara komersial dan sosial keuangan Islam dalam sistem keuangan negara republik Indonesia.

Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Non-Bank. Penelitian selanjutnya diupayakan dapat dikembangkan pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya dengan variabel yang bervariasi sehingga memunculkan inovasi dan pengembangan secara terus menerus lembaga keuangan syariah khususnya dan ekonomi Islam umumnya.

Diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dikembangkan meliputi skop dan ruang lingkup yang lebih besar seperti beberapa provinsi atau juga skala nasional. Selain itu juga dapat dibandingkan dengan penelitian dari negara-negara lain yang memiliki lembaga keuangan mikro syariah.

Akhirnya semua hasil penelitian terkait BMT dan Lembaga Keuangan Syariah diharapkan hasilnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lembaga terkait sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Baik manfaat bagi BMT atau Lembaga Keuangan Syariah semakin tumbuh dan berkembang, juga bagi seluruh pengawas, pengurus, pengelola, anggota, masyarakat, pemerintah dan para stakeholder lainnya. Tentunya juga meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Meningkatkan semangat kewirausahaan dan melahirkan pengusaha-pengusaha muda tingkat lokal, nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, Rose and Ismail, Abdul Ghafar. 2017. *Taking Stock on the Waqf-Based Islamic Microfinance Model*. International Journal of Social Economics, Vol. 44, no.8, hal.1018-1031.
- [2] Adnan, Akhyar, Muhammad dan Ajija, Shochrul Rohmatul. 2015. *The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty the Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution*. Humanomics, Vol.31 No. 2, hal. 160-182.
- [3] Andriani. 2005. *Baitul Maal Wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia)*. Empirisma, Vol.14 No. 2, hal. 248-258.
- [4] Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- [5] Ascarya. 2016. *Integration of Islamic Commercial and Social Finance in MS Scale*. The 2nd JIMF Call for Papers. Surabaya.
- [6] Ascarya, Husman, Jardine A. dan Suharto, Ugi. 2017. *Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam – Usulan Model*. Jakarta: Departmen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. Working Paper.
- [7] Indikator Strategis. 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. <https://riau.bps.go.id/quickMap.html>, diakses 20 Februari 2018.
- [8] Djazuli, A. Dkk. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [9] Hasbi, Hariandy. 2015. *Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia*. Procedia-Social and Behavioral Sciences 211, hal. 1073-2080.
- [10] Hamzah, Rusby, Zulkifli dan Hamzah, Zulfadli. 2013. *Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol.3 No. 8, 215-228.
- [11] Hosen, Nadrattuzaman, Muhammad and Sa'roni, Syukriyah, Lia. 2012. *Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil*. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences. Vol.1 No.4, hal. 36-55.
- [12] Karim, A, Adiwarmanto. 2009. *Permasalahan dan Konsep Syariah BMT*, <http://ekisopini.blogspot.com/2009/10/permasalahan-dan-konsep-syariah-bmt.html>, diakses 22 September 2017.
- [13] M, A., Siti Khadijah, Saleh, N.E.P, Kamarudin, M.F, A., Haryadi. 2013. *Sustainability of Islamic Micro Finance Institutions (IMFIs)*. Universal Journal of Accounting and Finance 1 (2), hal. 70-77.
- [14] Mahat, Mohd Amran, Jaaffar, Mohd Yasir and Rasool, Mohamed Saladin Abdul. 2015. *Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation*. Procedia Economics and Finance 31, pp. 294-302.
- [15] Nasution, Chollisni, Atiqi. 2014. *Efficiency of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): An Effort Towards Islamic Wealth Management in Microfinance Institution*. Journal of Muamalat and Islamic Finance Research Vol. 11/No.1, hal. 59-74.

- [16] Nazirwan, Mohamad. 2015. *The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java*. Victoria University: Doctor of Philosophy Dissertation.
- [17] Nomor Induk Koperasi. 2017. Website: nik.depkop.go.id, diakses 17 Nopember 2017.
- [18] Puspayoga. 2016. *Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi*. <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, diakses 25 September 2017.
- [19] Ridwan, Hasan, Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- [20] Riwajanti, Indah, Nur. 2014. *Exploring the Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty Alleviation through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 7, hal. 49-66.
- [21] Rusydiana, Aam S dan Devi, Abrista. 2013. *Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP)*, *Business and Management Quarterly Review*, Vol 4 (2), hal. 51-62.
- [22] Umum, Informasi. 2013. <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses 17 Nopember 2017.